
***POLICY EFFECTIVENESS AND INSTITUTIONAL READINESS OF INDONESIAN SMES
IN THE GREEN TRANSITION ERA: AN ANALYSIS BASED ON THE ASEAN SME
POLICY INDEX 2024***

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DAN KESIAPAN KELEMBAGAAN UKM INDONESIA DI
ERA TRANSISI HIJAU: ANALISIS BERDASARKAN INDEKS KEBIJAKAN UKM
ASEAN 2024**

^{1✉}Yulia Yunita Yusuf

Universitas Negeri Makassar

yulia.yunita.yusuf@unm.ac.id

²Anisatun Humayrah Rais

Universitas Negeri Makassar

anisatun.humayrah.rais@unm.ac.id

³Agung Muliaman Anas

Universitas Negeri Makassar

agung.muliaman@unm.ac.id

⁴Andi Nurrahma Gaffar

Universitas Islam Negeri Palopo

andinurrahmagaffar@uinpalopo.ac.id

⁵Andi Faisal

Universitas Negeri Makassar

andi.faisal@unm.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of Indonesia's government policies and institutional readiness in supporting the green transition of the MSME sector based on the ASEAN SME Policy Index 2024. The research employs a descriptive-comparative approach and exploratory qualitative analysis through a review of index documents, national policy reports, and international publications. The results show that Indonesia has experienced an increase in scores across almost all SMEPI dimensions since 2018, especially in access to finance and digitalization of SMEs. However, Indonesia's achievements remain low in the dimensions of Greening SMEs and Social & Inclusive Enterprises, indicating that the integration of environmental and social aspects into MSME policies has not yet become a primary priority. In terms of policy effectiveness, three national programs—SEHATI (BPJPH), the Green Financing Roadmap (OJK), and the Green Industry Program (Ministry of Industry)—have high relevance to the green transition, but their implementation effectiveness remains limited due to policy fragmentation and low green literacy among MSME actors. Institutional analysis indicates that Indonesia continues to face constraints in technical capacity, inter-ministerial coordination, and governance, particularly the lack of data-driven monitoring mechanisms and an integrated performance evaluation system for green policies. Overall, the study finds an institutional gap between policy design and implementation. These findings highlight the need for cross-sector policy harmonization, strengthening of green regulations and financing, and the development of data-based monitoring systems to support the transformation of MSMEs toward a green economy.

Keywords: Green Transition, Msmes, SME Policy Index, Policy Effectiveness, Institutional Readiness, Green Finance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah Indonesia dan kesiapan kelembagaan (*institutional readiness*) dalam mendukung transisi hijau sektor UMKM berdasarkan ASEAN SME Policy Index 2024. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif dan analisis kualitatif eksploratif melalui kajian dokumen indeks, laporan kebijakan nasional, serta publikasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan skor pada hampir seluruh dimensi SMEPI sejak 2018, terutama pada *access to finance* dan *digitalization of SMEs*. Namun, capaian Indonesia masih rendah pada dimensi *Greening SMEs* dan *Social & Inclusive Enterprises*, yang menggambarkan bahwa integrasi aspek lingkungan dan sosial dalam kebijakan UMKM belum menjadi prioritas utama. Dari sisi efektivitas kebijakan, tiga program nasional SEHATI (BPJPH), *Green Financing Roadmap* (OJK), dan Program Industri Hijau (Kemenperin) memiliki relevansi tinggi terhadap transisi hijau, tetapi efektivitas implementasinya masih terbatas akibat fragmentasi kebijakan dan rendahnya literasi hijau pelaku UMKM. Analisis kelembagaan menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi kendala pada aspek kapasitas teknis, koordinasi lintas kementerian, dan tata kelola (*governance*), terutama kurangnya mekanisme monitoring berbasis data dan sistem evaluasi kinerja kebijakan hijau yang terintegrasi. Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan institusional (*institutional gap*) antara desain kebijakan dan implementasinya. Temuan ini menegaskan perlunya harmonisasi kebijakan lintas sektor, penguatan regulasi dan pendanaan hijau, serta pembangunan sistem monitoring berbasis data untuk mendukung transformasi UMKM menuju ekonomi hijau.

Kata Kunci: Transisi Hijau, UMKM, *SME Policy Index*, Efektivitas Kebijakan, Kesiapan Kelembagaan, *Green Finance*.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran fundamental dalam menopang perekonomian di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia. Menurut laporan ERIA-OECD (2024), UMKM mencakup lebih dari 97–99% total pelaku usaha di negara-negara ASEAN dan menyerap lebih dari 80% tenaga kerja produktif. Di Indonesia, UMKM berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hingga 96,9% tenaga kerja (Wahyudi, Yulivan, & Rahman, 2024). Peran strategis ini menjadikan UMKM sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan stabilisasi sosial. Oleh karena itu, keberhasilan agenda transformasi ekonomi hijau di kawasan ASEAN tidak dapat dilepaskan dari sejauh mana UMKM mampu beradaptasi terhadap paradigma ekonomi berkelanjutan.

Namun, dalam menghadapi era transisi hijau (*green transition*), sektor UMKM menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kapasitas. Transisi menuju ekonomi rendah karbon memerlukan investasi awal yang tinggi, baik untuk modernisasi teknologi, efisiensi energi, maupun sertifikasi lingkungan. Bagi sebagian besar UMKM, terutama yang beroperasi di sektor informal, keterbatasan modal, minimnya pengetahuan tentang bisnis hijau (*green business literacy*), serta lemahnya akses terhadap insentif fiskal menjadi hambatan utama dalam mengadopsi praktik berkelanjutan (Durrani, 2024; Gunawan, Hermawan, & Handayati, 2022).

Selain itu, literasi keberlanjutan di kalangan pelaku UMKM Indonesia masih tergolong rendah. Studi oleh Rahman et al. (2024) menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha kecil menengah lebih berorientasi pada profit jangka pendek

dibanding investasi jangka panjang dalam keberlanjutan lingkungan. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara ambisi kebijakan pemerintah dan kesiapan faktual pelaku usaha untuk bertransformasi menuju ekonomi hijau.

Untuk merespons dinamika tersebut, ASEAN bersama OECD dan ERIA mengembangkan ASEAN SME *Policy Index* (SMEPI) yang berfungsi sebagai alat evaluasi kebijakan lintas negara dalam mengukur efektivitas dan kesiapan kelembagaan dalam mendukung pengembangan UMKM.

Edisi terbaru ASEAN SME *Policy Index* 2024 menilai kebijakan UMKM di sepuluh negara ASEAN berdasarkan delapan dimensi utama, termasuk *access to finance, entrepreneurship and human capital development, innovation and technology, digitalisation*, serta dimensi baru *greening SMEs* dan *social enterprises* (ERIA & OECD, 2024). Indeks ini memberikan kerangka evaluatif komparatif yang penting untuk menilai sejauh mana negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, telah mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kebijakan UMKM mereka.

Dalam laporan tersebut, Indonesia menunjukkan posisi yang menarik dan kontras. Di satu sisi, Indonesia mencatat skor tinggi pada dimensi akses keuangan (*access to finance*) berkat keberhasilan program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berbagai skema penjaminan usaha kecil. Namun di sisi lain, Indonesia memperoleh skor relatif rendah pada dimensi *social enterprise* dan *greening SMEs*, menandakan bahwa orientasi kebijakan nasional masih lebih menekankan pada aspek inklusi keuangan ketimbang pada keberlanjutan lingkungan dan sosial (ERIA & OECD, 2024).

Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana kebijakan pemerintah Indonesia telah efektif dalam mendukung transisi hijau UMKM dan bagaimana tingkat kesiapan kelembagaan nasional dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut secara sistemik dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong transisi hijau UMKM serta kesiapan kelembagaan (*institutional readiness*) dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-komparatif dengan pendekatan kualitatif eksploratif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan dan kesiapan kelembagaan Indonesia dalam mendukung transisi hijau UMKM berdasarkan kerangka OECD-ASEAN SME *Policy Index*.

Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi kebijakan dan capaian Indonesia dalam dimensi *green SMEs* serta *social enterprises* selama dua periode pengukuran (2018 dan 2024). Sementara itu, metode komparatif digunakan untuk membandingkan posisi Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya serta perubahan skor antar periode.

Pendekatan kualitatif eksploratif digunakan untuk menilai dimensi non-kuantitatif, seperti koordinasi antarinstansi, kapasitas kelembagaan, serta komitmen kebijakan dalam pelaksanaan program transisi hijau. Dengan demikian, penelitian ini mengombinasikan analisis dokumen kuantitatif (indeks) dan interpretasi kualitatif terhadap konteks kebijakan nasional.

2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari lembaga internasional dan nasional yang kredibel. Sumber data utama dan pendukung dijabarkan sebagai berikut:

a. Sumber Data Utama

Laporan *ASEAN SME Policy Index* 2018 dan 2024, yang diterbitkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia* (ERIA). Laporan ini menjadi dasar utama analisis komparatif antarperiode dan antarnegara dalam menilai kebijakan UMKM pada delapan dimensi utama, khususnya *Greening SMEs* dan *Social Enterprises & Inclusive SMEs*.

b. Sumber Data Pendukung

1. Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM): laporan program keberlanjutan dan kebijakan pembiayaan ramah lingkungan (2022–2024).
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): *Green Financing Roadmap Indonesia 2023–2030*, yang menjadi referensi kebijakan pembiayaan hijau sektor usaha kecil dan menengah.
3. Badan Pusat Statistik (BPS): data makroekonomi dan kontribusi UMKM terhadap PDB, tenaga kerja, dan sektor industri.
4. *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (UNESCAP): laporan *Green Business Readiness Index dan Sustainable Development Monitoring 2023*.
5. *World Bank* (2023): *Indonesia Green Growth Country Assessment*, yang memberikan gambaran umum tentang kesiapan regulasi dan pendanaan untuk transformasi hijau.

Data dari berbagai sumber tersebut digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan konteks empiris terhadap hasil evaluasi indeks.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur terhadap laporan resmi, publikasi internasional, dan dokumen kebijakan nasional. Prosedur pengumpulan data meliputi:

- a. Identifikasi dokumen utama: *ASEAN SME Policy Index* 2018 dan 2024.
- b. Pengumpulan dokumen pendukung: laporan kebijakan nasional dan internasional terkait green transition UMKM.
- c. Verifikasi sumber: hanya dokumen yang diterbitkan oleh lembaga resmi (OECD, ERIA, OJK, Kemenkop UKM, BPS, UNESCAP, World Bank) yang digunakan untuk menjaga validitas data.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dalam tiga tahap utama: (1) analisis deskriptif indeks, (2) analisis tematik kelembagaan, dan (3) analisis SWOT kebijakan.

a. Analisis Deskriptif Indeks

Analisis ini digunakan untuk:

1. Menggambarkan posisi dan tren skor Indonesia dalam *ASEAN SME Policy Index* tahun 2018 dan 2024.
2. Membandingkan perubahan skor antarperiode, khususnya pada dimensi *access to finance*, *digitalisation*, dan *greening SMEs*.
3. Mengidentifikasi arah perkembangan kebijakan Indonesia dalam konteks regional ASEAN.

Hasil analisis deskriptif disajikan dalam bentuk tabel dan grafik tren skor untuk memperlihatkan dinamika perubahan efektivitas kebijakan UMKM Indonesia.

b. Analisis Tematik (*Thematic Analysis*)

Analisis ini digunakan untuk mengevaluasi kesiapan kelembagaan (institutional readiness) berdasarkan tiga aspek utama yang diadopsi dari OECD (2019), yaitu:

1. Kapasitas: kemampuan sumber daya manusia, pendanaan, dan teknologi dalam implementasi kebijakan hijau.
2. Koordinasi: tingkat integrasi kebijakan lintas kementerian/lembaga dan hubungan antara pemerintah pusat-daerah.
3. Komitmen: sejauh mana keberlanjutan kebijakan dijaga melalui regulasi, anggaran, dan mekanisme evaluasi yang konsisten.

Analisis dilakukan dengan menelaah dokumen resmi (OJK, Kemenkop UKM, Kemenperin, World Bank) untuk mengidentifikasi pola tematik kesiapan kelembagaan yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan transisi hijau.

c. Analisis SWOT Kebijakan

Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) dari kebijakan UMKM hijau Indonesia. Matriks SWOT disusun berdasarkan hasil integrasi antara data indeks (kuantitatif) dan temuan kelembagaan (kualitatif), dengan rincian:

1. *Strengths*: keunggulan kebijakan nasional seperti dukungan pembiayaan KUR hijau dan roadmap green finance OJK.
2. *Weaknesses*: keterbatasan kapasitas dan koordinasi antarinstansi.
3. *Opportunities*: peluang kolaborasi regional dan peningkatan investasi hijau ASEAN.
4. *Threats*: tantangan eksternal seperti perubahan iklim, biaya transisi tinggi, dan kesenjangan literasi hijau pelaku UMKM.

Hasil SWOT akan digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy recommendations*).

5. Validitas dan Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan dokumen. Validitas hasil diperoleh dengan membandingkan temuan dari:

1. Data kuantitatif (skor SMEPI 2018–2024),
2. Data kualitatif (laporan kebijakan nasional), dan
3. Literatur akademik (jurnal dan laporan internasional).

Pendekatan triangulatif ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap efektivitas kebijakan dan kesiapan kelembagaan, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

6. Kerangka Analisis Penelitian

Kerangka analisis penelitian ini dibangun berdasarkan model hubungan antara efektivitas kebijakan (*policy effectiveness*) dan kesiapan kelembagaan (*institutional readiness*) terhadap keberhasilan transisi hijau UMKM (*green transition outcomes*). Secara konseptual, hubungan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kebijakan efektif (*policy effectiveness*) → menentukan arah, strategi, dan insentif untuk mendorong transformasi hijau UMKM.
- Kelembagaan siap (*institutional readiness*) → memastikan kebijakan dapat diimplementasikan melalui kapasitas, koordinasi, dan tata kelola yang baik.
- Keduanya secara simultan mempengaruhi tingkat keberhasilan transisi hijau UMKM Indonesia.

Kerangka ini mengadopsi model konseptual *Policy-Institutional Nexus*, yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan berkelanjutan bergantung pada interaksi dinamis antara desain kebijakan dan kesiapan kelembagaan pelaksana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Posisi Indonesia dalam ASEAN SME Policy Index 2024

Berdasarkan laporan OECD-ERIA (2024), kinerja Indonesia dalam ASEAN SME Policy Index 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan hasil tahun 2018. Secara umum, skor rata-rata nasional Indonesia mencapai 4,6 (dari skala 1–6), sedikit di atas median ASEAN sebesar 4,4. Hal ini mencerminkan adanya kemajuan dalam implementasi kebijakan pengembangan UMKM, terutama pada dimensi *access to finance* dan *digitalisation of SMEs*. Jika dibandingkan dengan laporan *ASEAN SME Policy Index 2018*, Indonesia mengalami kenaikan skor pada beberapa dimensi utama:

Tabel 1 Laporan ASEAN SME Policy Index 2018

Dimensi Kebijakan	Skor 2018	Skor 2024	Perubahan	Keterangan
<i>Institutional Framework</i>	4.2	4.4	+0.2	Peningkatan tata kelola regulasi UMKM
<i>Access to Finance</i>	4.5	5.1	+0.6	Ekspansi program KUR & pembiayaan hijau
<i>Entrepreneurship & Human Capital</i>	4.1	4.3	+0.2	Penguatan pelatihan kewirausahaan hijau
<i>Innovation & Technology</i>	3.9	4.2	+0.3	Dukungan riset dan teknologi bersih
<i>Internationalisation</i>	4.0	4.3	+0.3	Ekspor produk UMKM berkelanjutan meningkat
<i>Digitalisation of SMEs</i>	4.2	5.0	+0.8	Akselerasi adopsi teknologi digital
<i>Greening SMEs</i>	3.5	4.0	+0.5	Masih rendah; inisiatif hijau belum terintegrasi
<i>Social & Inclusive Enterprises</i>	3.6	3.9	+0.3	Program kewirausahaan sosial terbatas

(Sumber: diolah dari OECD-ERIA, 2018; 2024)

Walaupun terjadi peningkatan pada hampir seluruh dimensi, dua area yang masih lemah adalah “*Greening SMEs*” dan “*Social & Inclusive Enterprises*.” Keterlambatan ini terutama disebabkan oleh belum adanya kerangka kebijakan yang terintegrasi antara sektor industri, lingkungan, dan keuangan. Negara seperti Thailand (skor 4.8) dan Malaysia (4.7) telah lebih maju dalam membangun *green industrial clusters* dan *eco-innovation funding schemes*, sedangkan Indonesia masih berfokus pada pembiayaan umum UMKM tanpa diferensiasi yang kuat terhadap sektor hijau (OECD-ERIA, 2024). Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa posisi Indonesia berada di atas rata-rata ASEAN, tetapi masih menghadapi *implementation gap* pada aspek kebijakan hijau yang membutuhkan pendekatan lintas sektoral dan kelembagaan yang lebih terkoordinasi.

2. Analisis Efektivitas Kebijakan UMKM Hijau

Penilaian efektivitas kebijakan UMKM hijau di Indonesia mencakup tiga program nasional utama yang secara langsung atau tidak langsung berkontribusi terhadap transisi hijau, yaitu: (a) Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) oleh BPJPH Kemenag, (b) *Green Financing Roadmap* oleh OJK, dan (c) Program Industri Hijau oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

a. Program SEHATI (BPJPH)

Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) menjadi inisiatif penting dalam mendorong keberlanjutan sosial dan lingkungan melalui peningkatan standar produksi. Meskipun tidak secara langsung dikategorikan sebagai program “*green*,” SEHATI mendorong praktik higienis, efisien energi, dan kepatuhan lingkungan di sektor UMKM pangan dan kosmetik. Namun, hasil implementasinya masih terbatas karena tidak semua pelaku UMKM memiliki kapasitas administratif untuk mengakses fasilitas sertifikasi (BPJPH, 2023).

b. Green Financing (OJK, 2023)

OJK meluncurkan *Green Financing Roadmap Indonesia 2023–2030* sebagai panduan strategis nasional dalam memperluas akses pembiayaan hijau, termasuk bagi UMKM. Penerapan taksonomi hijau (*Green Taxonomy 2.0*) menjadi inovasi penting dalam mengklasifikasikan sektor-sektor ekonomi yang layak memperoleh insentif ramah lingkungan. Namun, evaluasi menunjukkan bahwa penetrasi pembiayaan hijau untuk UMKM masih sangat rendah (<10% dari total portofolio KUR), akibat minimnya literasi keuangan hijau dan keterbatasan agunan di kalangan pelaku usaha mikro.

c. Green Industry (Kemenperin)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Program Industri Hijau mendorong efisiensi energi, pengurangan limbah, dan sertifikasi industri hijau. Sejak 2020 hingga 2024, jumlah perusahaan yang memperoleh sertifikat industri hijau meningkat sekitar 20%, tetapi sebagian besar masih berasal dari industri menengah-besar, bukan UMKM (Kemenperin, 2024). Hal ini menunjukkan kesenjangan penerapan kebijakan hijau antara pelaku usaha besar dan kecil. Insentif fiskal yang ditujukan bagi industri besar belum menjangkau skala usaha kecil menengah.

Secara keseluruhan, ketiga program tersebut menunjukkan arah kebijakan yang relevan, namun efektivitas implementasinya masih terbatas oleh fragmentasi antar lembaga dan rendahnya sinergi lintas sektor (OECD, 2021). Efektivitas kebijakan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Relevansi: tinggi (karena selaras dengan agenda SDGs dan ASEAN 2025 *Vision*).
- b. Efisiensi: sedang (karena alokasi sumber daya dan koordinasi belum optimal).
- c. Keberlanjutan: rendah–menengah (karena ketergantungan pada dukungan proyek jangka pendek dan belum ada sistem insentif permanen bagi UMKM hijau).

3. Kesiapan Kelembagaan (*Institutional Readiness*)

Analisis kesiapan kelembagaan menggunakan tiga dimensi utama dari kerangka OECD (2019), yaitu kapasitas, koordinasi, dan *governance*.

Tabel 2 Kerangka OECD (2019),

Aspek Kelembagaan	Kondisi Aktual di Indonesia	Temuan Utama
Kapasitas (<i>Capacity</i>)	Kapasitas teknis Kemenkop UKM dan Kemenperin cukup baik, tetapi SDM di daerah masih terbatas.	Keterbatasan pelatihan dan tenaga ahli dalam pengelolaan bisnis hijau di level UMKM.
Koordinasi (<i>Coordination</i>)	Koordinasi antar lembaga (Kemenkop UKM, OJK, KLHK, Kemenperin) belum optimal.	Program berjalan sektoral, belum ada sistem <i>one data</i> UMKM hijau.
Governance	Regulasi dan tata kelola kebijakan masih tumpang tindih antar lembaga.	Kurang mekanisme pemantauan dan evaluasi kebijakan hijau berbasis indikator yang jelas.

(Sumber: diolah dari OECD, 2019; OJK, 2023; Kemenkop UKM, 2023)

Kelemahan utama kelembagaan terletak pada koordinasi antar instansi dan mekanisme evaluasi kebijakan. Misalnya, kebijakan *green finance* oleh OJK tidak sepenuhnya terhubung dengan program pelatihan UMKM oleh Kemenkop UKM atau *eco-industrial policy* oleh Kemenperin. Selain itu, mekanisme monitoring terhadap implementasi kebijakan hijau UMKM masih bersifat administratif, belum berbasis data hasil (*outcome-based evaluation*). Keterbatasan kelembagaan ini memperlihatkan bahwa *institutional readiness* Indonesia masih dalam tahap menengah, telah ada arah kebijakan yang jelas, namun belum disertai dengan tata kelola lintas lembaga yang efektif untuk mendukung transisi hijau secara menyeluruh.

Diskusi Konseptual: *institutional Gap* dalam Transisi Hijau

Hasil penelitian menunjukkan adanya *institutional gap* yang signifikan antara rancangan kebijakan dan implementasinya di lapangan. Kebijakan nasional seperti *Green Financing Roadmap* atau Program Industri Hijau telah menyediakan kerangka yang progresif, namun pada tingkat operasional masih terdapat kesenjangan dalam tiga hal:

- a. Integrasi Kebijakan: kebijakan terkait UMKM hijau tersebar di berbagai kementerian tanpa sistem koordinasi terpadu.

- b. Pendanaan dan Insentif: mekanisme pembiayaan hijau belum menjangkau skala mikro karena keterbatasan agunan dan risiko investasi tinggi.
- c. Pemantauan dan Evaluasi: belum terdapat green MSME *dashboard* nasional untuk mengukur kemajuan transformasi hijau secara kuantitatif.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, diperlukan integrated policy framework yang menggabungkan aspek kebijakan ekonomi, industri, dan keuangan dalam satu sistem kelembagaan. OECD (2021) merekomendasikan model *whole-of-government approach*, di mana kebijakan transisi hijau diintegrasikan melalui koordinasi lintas kementerian, insentif fiskal terpadu, dan dukungan pembiayaan yang adaptif bagi UMKM.

Dengan demikian, meskipun arah kebijakan Indonesia sudah berada pada jalur yang benar, keberhasilan transisi hijau UMKM akan sangat bergantung pada penguatan tata kelola kelembagaan, harmonisasi kebijakan, dan implementasi insentif berbasis kinerja (*performance-based incentives*)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap ASEAN SME Policy Index 2024 serta kajian kebijakan nasional, dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan Indonesia menuju pengembangan UMKM hijau telah menunjukkan kemajuan signifikan, meskipun implementasinya belum sepenuhnya terintegrasi dan efektif secara kelembagaan. Kebijakan nasional seperti Green Financing Roadmap oleh OJK, Program Industri Hijau oleh Kemenperin, dan inisiatif sertifikasi SEHATI oleh BPJPH memiliki relevansi tinggi terhadap agenda keberlanjutan dan target SDGs 2030, tetapi efektivitasnya masih terbatas karena pelaksanaannya bersifat sektoral dan belum didukung sistem koordinasi lintas kementerian yang kuat. Hasil komparasi skor ASEAN SME Policy Index 2018–2024 menunjukkan peningkatan pada dimensi access to finance dan digitalisation of SMEs, namun Indonesia masih tertinggal pada greening SMEs dan social enterprise, yang menandakan bahwa integrasi aspek lingkungan dan sosial dalam kebijakan UMKM berkembang lebih lambat dibanding aspek finansial dan digitalisasi. Dari sisi kelembagaan, institutional readiness Indonesia masih menghadapi kendala pada kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, serta governance dan pembiayaan hijau, termasuk belum adanya sistem insentif terpadu dan mekanisme green credit guarantee bagi UMKM kecil. Secara keseluruhan, kebijakan Indonesia menuju UMKM hijau bersifat progresif namun belum komprehensif secara kelembagaan, dengan kelemahan utama terletak pada koordinasi, kapasitas daerah, dan inklusi pembiayaan hijau. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan strategi penguatan kelembagaan dan kebijakan melalui integrasi lintas kementerian melalui pembentukan Green Policy Coordination Body, peningkatan akses pembiayaan hijau melalui skema Green Credit Guarantee, penguatan kapasitas kelembagaan daerah melalui pembentukan Regional Green MSME Hubs, serta pengembangan sistem monitoring berbasis data digital berupa Green MSME Monitoring Dashboard yang terintegrasi dengan SME Data Hub untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Albort-Morant, G., Leal-Millán, A., & Cepeda-Carrión, G. (2018). The antecedents and outcomes of eco-innovation: A systematic literature review. *Journal of Cleaner Production*, 195, 1270–1282. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.05.278>
- Asian Development Bank (ADB). (2022). *Asia's journey to prosperity: Policy, market, and technology drivers of green industrialisation*. ADB Publishing. <https://www.adb.org/publications>
- BPJPH. (2023). *Laporan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2023*. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kementerian Agama RI.
- Durrani, N. (2024). *Barriers to adaptation of environmental sustainability in SMEs: A qualitative study*. *PLOS ONE*, 19(3), e0298580. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0298580>
- ERIA & OECD. (2024). *SME Policy Index: ASEAN 2024 – Enabling sustainable growth and digitalisation*. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia; Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://www.oecd.org/publications/sme-policy-index-asean-2024>
- Gunawan, A. A., Hermawan, A., & Handayati, P. (2022). Institutional barriers and facilitators of sustainability for Indonesian batik SMEs: A policy agenda. *Sustainability*, 14(14), 8772. <https://doi.org/10.3390/su14148772>
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin). (2024). *Laporan Tahunan Program Industri Hijau Nasional*. Kemenperin RI. <https://kemenperin.go.id>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2019). *Measuring institutional capacity for policy implementation*. OECD Policy Paper. <https://www.oecd.org/governance>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). *Facilitating the green transition for ASEAN SMEs: A toolkit for policymakers*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/industry/smes/facilitating-the-green-transition-for-asean-smes.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Green Financing Roadmap Indonesia 2023–2030*. OJK Indonesia. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/green-finance>
- Panuju, A. Y. T., & Bakri, S. (2024). Green innovation for SMEs in Indonesia – A literature analysis. *Journal of Engineering and Scientific Research*, 6(1), 16–22. <https://doi.org/10.23960/jesr.v6i1.157>
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland* (3rd ed.). University of California Press.
- Rahman, H., Oktavia, S., Shetye, N., & Azonhoumon, W. L. S. (2024). Enhancing operations for sustainability in Indonesian SMEs through climate change awareness and business orientation. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 23(1), 109–119. <https://doi.org/10.25077/josi.v23.n1.p109-119.2024>
- Shabbir, H., Haider, S. W., Iqbal, M. W., & Ahmad, S. Z. (2024). Antecedents of green manufacturing implementation by local MSMEs in Indonesia. *Revista de*

Gestão Social e Ambiental, 18(10), e08509.
<https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n10-088>

United Nations Environment Programme (UNEP). (2023). *Global Environment Outlook for Business: Green transition and sustainable finance*. UNEP Publishing. <https://www.unep.org/resources>

Wahyudi, A. S., Yulivan, I., & Rahman, A. (2024). The role of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in supporting Indonesia's economic resilience. *Jurnal Pertahanan*, 10(2), 297–307. <https://doi.org/10.33172/jp.v10i2.19519>

World Bank. (2023). *Indonesia Green Growth Country Assessment*. The World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia>